



WALL

BUNTI KEDUND
FRONTAL JAWA TERDAK

PERATURAN BUPATI KESUMEN
NOMOR 154 TAHUN 2021

TESTING

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEH TASTAN 2021-2026

DONGJIAN ZHANG, JIA TIAN, YANFENG MA, AND YI MA

SUBJECT RESUMES

- | | |
|--------------------------|--|
| <p>Merintangi</p> | <ol style="list-style-type: none"> bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan instansi pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan administrasi kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tugas dan peranan organisasi; bahwa berdasarkan Instruksi Presiden 4 April 83 Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 PER/24/M.PAN/3/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kutubun Tahun 2021 - 2026; |
| <p>Mengingat</p> | <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan; |



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

MEMUTUHKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PRAMANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Pramangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dan berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengklasiforan dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka penanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RSDPA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



9. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sebagai perwujudan dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebunrejo Tahun 2021-2026, yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
10. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari visi dan misi yang tertuang dalam Tahun 2021-2026, yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
11. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
12. Penilaian Kinerja adalah serangkaian kegiatan pencapaian perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta strategi masalah yang timbul dan akan akan timbul untuk dapat diidentifikasi tindakan selanjutnya.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.
14. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebunrejo Tahun 2021-2026.
15. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
16. Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Tujuan RPJMD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
17. Tujuan Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Tujuan Rencana Strategi Perangkat Daerah adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rancangan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Sasaran Rencana Strategi Perangkat Daerah adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rancangan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
20. Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Program RPJMD adalah inisiatif kegiatan yang berkesinambungan lebih lanjut yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh dampak sebagai berikut:



21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terakur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengubahan sumber daya berupa personel sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemuanya untuk dapat terakur.
22. Hasil adalah angka statistik yang menunjukkan berlangsungnya kegiatan dan kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
23. Keberhasilan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.
24. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud dan tujuannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen SAKIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan efektivitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemilihan dan penggantian penjabat SKU;
- b. penggunaan SKU; dan
- c. pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawalan.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGANTARAN PENETAPAN SKU

Pasal 5

- (1) Penetapan SKU Perangkat Daerah menyesuaikan dan selaras dengan SKU Pemerintah Daerah.
- (2) SKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja tahunan dan hasil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKU Pemerintah Daerah seluasnya meliputi indikator indikator hasil; dan
 - b. SKU Perangkat Daerah seluasnya meliputi indikator indikator hasil.
- (3) SKU Pemerintah Daerah dan SKU Perangkat Daerah seluasnya meliputi



Pasal 6

Penilaian dan pengembangan petilapan IKU mempertimbangkan hal sebagai berikut :

- a. dokumen RPJMD dan/atau Rencana Perangkat Daerah, kebijakan umum dan/atau dokumen strategi lainnya yang relevan;
- b. tugas kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi lainnya untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelerasan pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV PENGOLOKAN IKU

Pasal 7

IKU digunakan untuk

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen pedoman kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja; dan
- h. pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 8

Kelengkapan penempatan tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana tertera dalam dokumen RPJMD dan Rencana Perangkat Daerah, dinyatakan dengan IKU.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan peranan IKU guna melengkapi informasi yang diberikan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, singkat dan jelas dengan manfaat yang ada baik berupa kerdala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V PENILAIAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan penilaian dan pengembangan pelaksanaan IKU.
- (2) Dalam pelaksanaan penilaian dan pengembangan pelaksanaan IKU Bupati mengundang Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang संबंधи pengendalian akuntabilitas kinerja.
- (3) Koordinasi pengendalian IKU ke dalam sistem pemerintahan, penganggaran, monitoring dan evaluasi peranan program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pemerintahan.



BAGI VI
KETENTUAN PENUTUP

Paragraf 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditandatangani di Kaimana
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KAIMANA,

td.

ARIF SUKUMATO

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAIMANA

td.

AHMAD UANGU BUDIONO

SERTA DAIRAH KABUPATEN KUBU LINGGAT TAHUN 2021 NOMOR 194

Selaku sesuai dengan adanya
PL. KEPALA BIDANG HUKUM
SERTA KABUPATEN KUBU LINGGAT
KEPALA SUBDIBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

td.

SURDIONIMALEH MH

Pemata Td.I

NIP. 19761029 202001 2 006



INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDUMEN
TAHUN 2021-2026

Yang
Menyusunkan Kabupaten Kedumen Bersama Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan
Bersama Rakyat.

Misi

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan berbasis yang responsif serta penguatan e-gov dan open-gov integrasi
2. Peningkatan akreditasi dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Menwujudkan daya tarik ekonomi daerah melalui pengenthanan potensi sumber daya alam pemerintah dan kreatif lokal yang berbasiskan agribisnis dan ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berkeadilan lingkungan;
5. Menwujudkan masyarakat yang toleran, berbudaya dan bermartabat;

MISI DAN TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Misi 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan berbasis yang responsif serta penguatan e-gov dan open-gov integrasi			
Tujuan : Menwujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik			
Indeks Reformasi Birokrasi	Kualitas	Formulasi Pengukuran Penilaian berdasarkan kuantitas persentase A. Indikator Pengukuran Berikut 90% 1. Percepatan (berikut 30%) 2. Hasil antara lain perbaikan (berikut 70%) 3. Reformasi (berikut 90%)	



			Tipe penghitungan : Non Normal Sumber Data : IPS
Menghitung persentase pembangunan	Selisihan Pendapatan Individu Berisi Buruk	%	Formula Pengukuran : jumlah pendapatan kelompok berpendapatan 40% terendah / total pendapatan seluruh penduduk x 100% Tipe Pengukuran : Non Normal Sumber Data : IPS

Sarana:

Derajatnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	Formula Pengukuran : $PO = q \left[\frac{Z - Y}{Z} \right]$ PO = Basis Geografis Kemiskinan (Poverty Gap) Z = Data Kemiskinan Q = Jumlah Produk Miskin Y = Pendapatan Individu penduduk miskin n = Jumlah Produk (jumlah penduduk dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan / jumlah penduduk total EPK) x 100% Tipe Pengukuran : Non Normal Sumber Data : IPS
----------------------------	--------------------	---	---

Map 4 : Penyebaran lokasi dan kualitas infrastruktur yang berpengaruh dan berwujud lingkungan

Tujuan			
Mengukur persepsi pembangunan dan pemerataan pembangunan yang berbudaya	Indeks Kesejahteraan dan Lingkungan Hidup	%	Formula Pengukuran : $0,75 \text{ (nilai kuantitatif infrastruktur daerah jawa Tengah)} + 0,25 \text{ (nilai kualitatif lingkungan hidup dalam 5)}$ Tipe Pengukuran : Non Normal Sumber Data : IPS/IPS



Mata 6 : Menjadikan kemampuan yang unggul, berkeadilan dan berkelanjutan

Meningkatkan kontribusi sosial di masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	Pemetaan Pengukuran : 0,7xIndeks Kualitas Infrastruktur daerah (Mata 9a) + 0,3xIndeks Kualitas Lingkungan & Hidup (Mata 11) Tipe Pengukuran: Non Sustained Sanksi Dulu - Seges Kesejahteraan Rakyat Secara

RIYATI HERNANDA

HE

ATIF HADIYANTO

LAMPIRAN 3
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 154 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

A. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKUKAKAN
TUGAS

FUNGSI

- Unter Staf Pendukung Kepala Daerah:
- 1. Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
 - 2. a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pengkoordinasian proses pemerintahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatakelola, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
 - f. pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak terdapat dalam tugas perangkat daerah;
 - g. pelayanan administratif dan pemantauan kinerja pejabat pada instansi Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN RUMAH STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PEMILAIAN (Rendahnya Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
TUGAS 1			
Mewujudkan kabupaten yang lebih pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Pemilahan Pengukuran : Pemilahan berdasarkan komponen penilaian: A. Komponen Pengukuran (dari 17%) 1. Pemilahan (dari 37%)



			2. Manti utama atau perantara (bobot 10%) 3. Kainem (bobot 30%) B. Komposisi Hasil (bobot 40%) 1. Kelestarian sumber daya lingkungan (20%) 2. Kualitas pelayanan (20%) 3. Pemasokan yang bersih dan dari bahan lokal (10%) 4. Kinerja organisasi (10%) Tipe Pengukuran : Non Standard Sumber Data : Laporan/REKAM dan RE
--	--	--	--

Sasaran: Meningkatkan hasil dan pelayanan publik	Indikator Kapasitas dan Masyarakat	metode	Formulasi Pengukuran : Hasil bertitik-titik 9 unsur: Sosial Kapasitas Masyarakat yaitu: 1. Partisipasi 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Responsif 5. Perilaku spesifik jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Etika dan integritas 9. Penguasaan pengetahuan, keterampilan dan keahlian Tipe Pengukuran : Non Standard Sumber Data : Bagian Organisasi Serta Kabupaten Kabupaten
--	---	---------------	--

Tujuan dan Sasaran Utama: Berlangsungnya produksi mikro	yang menjadi Tanggungjawab Digital Struktural	Ya	Formulasi Pengukuran : (Jumlah produksi dengan pengkajian 4) / jumlah partisipasi / jumlah produksi resmi EPDA x 100% Tipe Pengukuran : Non Standard Sumber Data : SP9
---	--	-----------	--



Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, terkhususnya dan melalui dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4 Formulasi Pengukuran : (PDDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (i) - PDDB Atas Dasar Harga Standar Tahun (ii) / PDDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (i) x 100% Tipe Pengukuran : Non Standard Sumber Data : BPS, DANPERSINDO KUTIM
Perwujudan lingkungan bersih dan alamiah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Formulasi Pengukuran : Penelitian diinterpretasikan oleh BPS dengan aspek-pemertan penelitian 1. Permasalahan dengan Struktur Akuntansi Pemerintahan 2. Sistem laporan penganggaran 3. Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern Tipe Pengukuran : Non Standard Sumber Data : BPS



B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DATRAH KABUPATEN KEDIRI

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN TUGAS POLIK

Unit Staf Pendukung DPRD

FUNGSI

- 1. membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengorganisir tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan;
- 2. penyelenggaraan administrasi pemerintahan DPRD;
- 3. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 4. layanan penganggaran rapat DPRD;
- 5. penyedia dan pengendalian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATUAN	PELAKSANAAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tipean :			
Mewujudkan informasi dan akses pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Informasi Berbasis	Indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan komposisi publikasi: A. Komposisi Pengungkap (skor 50%) 1. Pemerkahan (skor 20%) 2. Hasil karya atau penelitian (skor 10%) 3. Reformasi (skor 20%) B. Komposisi Hasil (skor 40%)



			1. Akuratisasi kinerja dan keuangan (30%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Pemenuhan yang bersih dan bebas KKN (10%) 4. Kinerja organisasi (30%) Tipe Pengukuran : Non Stimulasi Sumber Data : Dokumentasi DAN dan RP
Indikator: Menangkasnya kualitas pelayanan publik	Indikator: Kapasitas Masyarakat	Indikator:	Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 5 unsur Survei Eksplan 1. Monevitas/pelita Pengawasan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Sistem pemerintahan 4. Baga/vari 5. Protokol spesifikasi pada pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Protokol pelaksanaan 8. Waktu dari prosedur 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Pengukuran : Non Stimulasi Sumber Data : Dialog Organisasi Serta Kabupaten, Kabupaten
	Output: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat dan Penguasaan	4	Formulasi Pengukuran : persentase indikator pengawasan + persentase realisasi pembangunan di antara anggaran + persentase realisasi pembangunan dan pembangunan raporta + persentase indikator pengawasan, aspirasi + persentase realisasi pembangunan kesehatan / 5 Tipe Pengukuran : Non Stimulasi Sumber Data : DGTAW



C INSPEKTORAT DASRAH KABUPATEN KEDIRI

LEMBAGA PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS

Unitas yang menjalankan fungsi Pengawasan

FUNGSI

- Membantu Bupati dalam menerima dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - Membantu Bupati dalam menerima dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan instansi, audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - pelaksanaan pengawasan urusan tugas urusan dan pengawasan Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - pelaksanaan koordinasi pengawasan tidak langsung lainnya;
 - pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TOPIK DASAR STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan: Memastikan informasi tentang kinerja pemerintahan yang benar dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Formulasi Pengukuran: Pendekatan berdasarkan komponen penilaian A. Komponen Pengukuran (skor 0-100)



			1. Perencanaan (Bobot 30%) 2. Hasil antara antara perubahan (Bobot 10%) 3. Rekrut (Bobot 30%) 2. Kemampuan Hasil (Bobot 40%) 1. Kemampuan kinerja dan kuantitas (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Perencanaan yang efektif dan efisien (10%) 4. Kemampuan organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Yuridikal Sumber Data : Dokumentasi PAU dan SD
--	--	--	---

Measuran

Yamudjaya (bukan: hasil dan kinerja)	Indikator	Nilai	Formula Pengukuran : Akumulasi dari penilaian: Penilaian kinerja bobot 30% + Pengukuran kinerja (bobot 30%) + Pelaksanaan kinerja (bobot 15%) + Kualitas kinerja (bobot 10%) + Capaian kinerja (bobot 20%) Tipe Pengukuran: Non Yuridikal Sumber Data : Dokumentasi PAU dan SD
	Indikator SPK	Nilai	Formula Pengukuran : Penilaian berdasarkan 3 aspek penilaian: 1. Penetapan Tujuan (40%) a. Kualitas Sasaran Strategis b. Kualitas Strategi Penetapan Sasaran Strategis 2. Struktur dan Proses (30%) a. Lingkungan



			e. Kegiatan perdagangan d. Interaksi dan komunikasi a. Perencanaan 1. Perencanaan Tujuan (30%) a. Efisiensi dan Efektivitas - Perencanaan Tujuan Organisasi b. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan c. Pengendalian dan Akut d. Efisiensi pada Perencanaan - Perundang-undangan Tipe Pengukuran: Kualitatif Tingkat Data : BPP2
	Kepribadian AP7	Rilei	1. Perencanaan Perencanaan berdasarkan kebutuhan AP7 untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi yang terdiri dari satu elemen saja. 1. Perencanaan Perencanaan / Perencanaan (1-5) 2. Perencanaan Perencanaan / Perencanaan (1-5) 3. Perencanaan Perencanaan / Perencanaan (1-5) 4. Perencanaan Perencanaan / Perencanaan (1-5) 5. Perencanaan Perencanaan / Perencanaan (1-5) 6. Perencanaan Perencanaan / Perencanaan (1-5) 7. Perencanaan Perencanaan / Perencanaan (1-5) 8. Perencanaan Perencanaan / Perencanaan (1-5) 9. Perencanaan Perencanaan / Perencanaan (1-5) 10. Perencanaan Perencanaan / Perencanaan (1-5) Tipe Pengukuran: Kualitatif Tingkat Data : BPP2



	Sifat Hierarchy Korupsi	Itikad	Formulasi Pengendalian dibuat berdasarkan 7 dimensi) yaitu: 1. Pendidikan pengadilan belajar dan jasa; 2. Integrasi dalam pelaksanaan tugas; 3. Penghilangan anggapan; 4. Transparansi; 5. Penguatan pengaruh (framing in influence); 6. Penghilangan sumber daya manusia; 7. Sosialisasi anti korsup. Tipe Pengukuran: Non Wawancara Number Data : 6/1 37X
--	------------------------------------	---------------	---



D. DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KIRMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	Crutan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TUGAS POJOK	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pemerintahan yang diberikan kepada Daerah.
FUNGSI	a. penyusunan rencana dan program di bidang sumber daya kesehatan dan perkembangan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan perkembangan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; c. pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya kesehatan dan perkembangan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; d. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan perkembangan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan dan perkembangan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; f. pelaksanaan administrasi Dinas; g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis, Unit Organisasi Binaan Khusus dan Unit Organisasi Binaan Pangmas pada Dinas; dan h. pelaksanaan fungsi, kedudukan lain yang diberikan oleh Bupati.



TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INSTRUMEN KINERJA	SATUAN	PELAKSANA (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan:			
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Formula Pengukuran dengan komponen berikut: 1. Dimensi pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 2. Dimensi kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup 3. Dimensi Penghijauan dengan indikator Penghijauan Partisipatif Tipe Pengukuran: Non Komulatif Sumber Data: BPS
Sasaran:			
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangka um pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	Formula Pengukuran menggunakan rumus berdasarkan rata-rata perkiraan tingkat tahun yang dapat diharapkan hidup seseorang sejak lahir Tipe Pengukuran: Non Komulatif Sumber Data: BPS/KESDPT/CS
	Prosedure Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	Formula Pengukuran sesuai PP No 2 Tahun 2018, Permenagri No.100 Tahun 2018, PMK No.4 Tahun 2019 (menentukan itu berarti mendapatkan pelayanan kesehatan itu sesuai standar + pemerintah itu berarti mendapatkan pelayanan pelayanan sesuai standar + prosedur bagi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bagi baru lahir sesuai standar + cakupan pelayanan kesehatan bagi baru lahir



			daun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + pemeriksaan ulang setiap 15 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + pemeriksaan ulang setiap 60 bulan ke dua yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + pemeriksaan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + pemeriksaan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + pemeriksaan IDGJ baru yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + pemeriksaan ulang setiap 100 yang mendapat pelayanan TBC setiap standar + pemeriksaan ulang dengan risiko terdapat HIV mendapatkan pelayanan skrining anti HIV sesuai standar : 17 Tipe Pengukuran: Non Kuantitatif Sumber Data DINESPPNGB
Mengetahui petugas pengukuran dan analisis	Cekupan Peserta KB Aktif	4	Formulasi Pengukuran jumlah peserta KB aktif / jumlah pasangan usia subur x 100% Tipe Pengukuran Sumber Data DINESPPNGB



E. DINAS PENDIDIKAN, KEPERAWATAN DAN OLARAHGABUPATEN KIRMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN TUGAS

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Keperawatan dan Olahraga
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang keperawatan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah

MUNICI

- perencanaan rencana dan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, keperawatan dan olahraga;
- perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, keperawatan dan olahraga;
- pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, keperawatan dan olahraga;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, keperawatan dan olahraga;
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, keperawatan dan olahraga;
- pelaksanaan administrasi Dinas;
- pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi pembinaan dan yang diberikan oleh Bupati

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PEMILIHAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Formulasi Pengukuran dengan metode penilaian 1. Kualitas pendidikan dengan indikator



			Kata Mula Lampa Sekolah (KLS) 2. Ditemui terdapat dengan indikator Angka Harapan Lima? 3. Ditemui Pengukuran dengan indikator Pengukuran Persepsi Tipe Pengukuran: Kuantitatif Sumber Data : SPSS
Sumber: Mengingat daya, ketersediaan dan mutu pendidikan	SPSS (KLS) Lampa Sekolah	Tahap 2	Formulasi Pengukuran jumlah tahun yang diharapkan akan produced oleh masyarakat pendidikan formal Catatan yang dituang dalam pengukuran Kata mula Lampa Sekolah adalah pondok, bernomor 75 tahun ke atas Tipe Pengukuran : Kualitatif Sumber Data : SPSS
	Harapan Lampa Sekolah	Tahap 3	Formulasi Pengukuran dengan indikator 3400 jumlah tahun yang diharapkan akan produced oleh anak pada masa tersebut di masa datang. Catatan yang dituang dalam pengukuran Harapan Lampa Sekolah adalah pondok bernomor 7 tahun ke atas Tipe Pengukuran : Kualitatif Sumber Data : SPSS



	Asuransi Cagasan SDM Pendidikan	5	Formulasi Pengukuran: (persentase anak usia 5 & tahun yang telah masuk atau sedang belajar di satuan PAUD) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar - persentase anak usia 7-12 tahun yang tidak masuk atau sedang belajar di SD/ sederajat yang mendapat pelayanan sesuai standar - persentase anak usia 13-15 tahun yang telah masuk atau sedang belajar di SMP/ sederajat yang mendapat pelayanan sesuai standar - persentase anak usia 7-18 tahun yang tidak masuk atau sedang belajar di pendidikan menengah yang mendapat pelayanan sesuai standar : 4 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISKOPORA
Meningkatnya tingkat keselamatan masyarakat dan pengakuan program pemerintah	Angka Harapan hidup	TAKLE	Formulasi Pengukuran: tingkat kematian secara beraturan dari rata rata dalam banyak tahun yang dapat diinterpretasi oleh seseorang, baik laki Tipe Pengukuran: Non Kumulatif
	Persentase Cagasan Perkota yang Aktif	4	Sumber Data : BPS Formulasi Pengukuran: jumlah organisasi pemuda yang aktif / jumlah seluruh organisasi pemuda x 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : DISKOPORA



	Persentase Presensi Keluarga	1.	Formula Pengukuran: jumlah nomor datang keluarga yang berpresensi / jumlah nomor datang keluarga yang mengikuti event keluarga x 100% Keuntungan : (tidak dapat modal uang/porsi/pengeluaran di luar provinsi dan nasional) Tipe Pengukuran : Non- Kuantitatif Sumber Data : DIDDEFOGA
--	---------------------------------	----	---



F. URAIAN PEKERJAAN UMUM DAN PENYATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEH

URUSAN PEMERINTAHAN
TANPA DILAKUKANYA
TUGAS POSISI

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemerintahan yang diberikan kepada daerah

FUNGSI

- penyusunan rencana dan program di bidang tata ruang, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- perencanaan kebijakan di bidang tata ruang, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- pelaksanaan koordinasi di bidang tata ruang, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- pelaksanaan administrasi Umum;
- pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi pelayanan lain yang diberikan oleh Tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PELAKSANA Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data
Tujuan: Menyediakan informasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Dinas	Indeks	Formulasi Pengukuran : Punksi dan Bertekanan komponen penilaian: A. kuantitas Pengukuran tabel: 50% 1. Penilaian (tabel: 20%) 2. Hasil antara area pelayanan (tabel: 10%) 3. Sistem (tabel: 20%)



			8. Kemampuan Hasil Bekerja 40% 1. Administrasi Kantor dan Daerah (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Perencanaan yang bersih dan dari selain RPD (10%) - Karya organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Kuantitatif Sumber Data: Kementerian PAN dan RB
Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Formulasi Pengukuran : Hasil awal berdasarkan 4 unsur kerja, kepuasan masyarakat publik 1. Persepsi 2. Sikap, minat dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jasa pelayanan 6. Kompetensi pelayanan 7. Perilaku pelayanan 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Pengukuran: Non Kuantitatif Sumber Data: Survei Dipusat Kota Kaltipati, Kabupaten
Tujuan: Mewujudkan peningkatan partisipasi dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	Formulasi Pengukuran : 0, (indeks indeks infrastruktur daerah (dalam %)) + 0, (indeks indeks lingkungan hidup dalam %) Tipe Pengukuran: Sumber Data : SPUR Kaltipati, Kabupaten
Sasaran: Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks	Formulasi Pengukuran : Indeks indeks terdapat pekerjaan umum (dalam %) + indeks infrastruktur pertumbuhan dan kawasan pemukiman (dalam % + indeks infrastruktur)



			Tipe Pengukuran : Ym Kontrol Sumber Data : EPUP Kategori : Kebenaran
	Persentase Penanganan Bongkar & Lahan	%	Formula: Pengukuran jumlah bongkara lahan yang ditangani / jumlah bongkara lahan yang terjadi x 100% Tipe Pengukuran : Ym Kuantitatif Sumber Data : EPUP Kategori : Kebenaran



3. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN TUGAS POKOK

FUNGSI

- 1. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Perhubungan
- 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pemerintahan yang diberikan kepada Daerah
- 3. a. penyusunan rencana dan program di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
- 4. b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
- 5. c. pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
- 6. d. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
- 7. e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
- 8. f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- 9. g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
- 10. h. pelaksanaan fungsi koordinasi lain yang diberikan oleh Bupati.

TAUANG DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BATAS	PERJELASAN (Format: Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan			
Mewujudkan pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan melalui meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	Format: Pengukuran : Q, % Indeks kualitas infrastruktur daerah tahun % Tipe Pengukuran: Non Kuantitatif



Varian:

Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Indeks Infrastruktur Perhubungan

%

Formula Pengukuran :

$$\text{Indeks Infrastruktur perhubungan tahun } (t) = \frac{\text{Indeks Infrastruktur perhubungan dan kawasan permukiman tahun } (t)}{\text{Indeks Infrastruktur perhubungan tahun } (t-1)} \times 100$$

Tipe Pengukuran: Kumulatif

Sumber Data :
 DISKOMINFO

Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

%

Formula Pengukuran :

$$\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang dirangsang tahun } 2022 \text{ s.d tahun } (t) / \text{jumlah rumah tidak layak huni yang dirangsang dirangsang tahun } 2022 \text{ s.d tahun } 2022 \text{ dari SP3H} \times 100\% + \text{dari kawasan rumah ci rumah 10 Ha yang dirangsang} / \text{luas rural kawasan rumah ci rumah 10 Ha} \times 100\% / 2$$

Tipe Pengukuran: Rata Rata

Sumber Data :
 DISKOMINFO



H. SATUAN POLISI PALINGS PRIMA KASUPRINTEN KESUMBUH

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN

Urusan Pemerintahan Bidang Registrasi, Kertibisa Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan dan Kertibisa Umum serta Urusan Kelangkaan

TUGAS

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutubun adalah melaksanakan urusan bidang registrasi dan kertibisa umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kelangkaan

FUNGSI

- penyusunan rencana dan program di bidang pengisian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketransiran, kertibisa umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kelangkaan dan penyelamatan;
- penyusunan kebijakan di bidang pengisian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketransiran, kertibisa umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kelangkaan dan penyelamatan;
- pelaksanaan koordinasi di bidang pengisian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketransiran, kertibisa umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kelangkaan dan penyelamatan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengisian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketransiran, kertibisa umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kelangkaan dan penyelamatan;
- pengendalian, evaluasi dan persiapan di bidang pengisian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketransiran, kertibisa umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kelangkaan dan penyelamatan;
- pelaksanaan administrasi legalitas;
- pengendalian pengelenggaraan tugas dan Pelaksanaan Teknis; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BATASAN	PEMILAHAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan Memajukan kemandirian wilayah	Indikator Kemandirian wilayah	Indikator	Terdapat Pengukuran kemajuan kemandirian wilayah



			Tipe Pengukuran : Non Numerik Sumber Data : SP30 dan Satpal PP
Sasaran :			
Meningkatkan Kualitas Masyarakat	Persentase penanganan pelanggaran pidana	%	Formula Pengukuran : (jumlah penyelesaian pelanggaran pidana / jumlah pelanggaran pidana) x 100% Tipe Pengukuran : Non Numerik Sumber Data : Satpal PP
	Persentase Masyarakat Berkeadilan	%	Formula Pengukuran : (jumlah wilayah yang mendapat respon time 0-5 menit penanganan keluhan dan non kekerasan / jumlah keseluruhan wilayah (35 wilayah) x 100% Tipe Pengukuran : Non Numerik Sumber Data : Satpal PP



1. BIDANG SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PERUMPAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KOTIMUTU

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN

TUGAS POKOK

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI

a. penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. penumasan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

f. pelaksanaan administrasi Daerah;

g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



Variabel dan Sarafan SUSARSO	Indikator KINERJA	Variabel	Metrik/Formula (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Formulasi Pengukuran : $IPM = 1/3 \times \text{Indeks } I_1$ Keterangan : $\text{Indeks } I_1 (I_1) = \text{Indeks}$ komponen $\text{IPM ke } i \text{ untuk wilayah } I_1$ $i = 1, 2, 3$ $j = 1, 2, \dots, k$ wilayah dengan korpyen pendidikan: 1. Dimensi pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Tasa-Tasa Lama Sekolah (TLLS) 2. Dimensi kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup 3. Dimensi Pengukuran dengan indikator Pengeluaran Perkapita Tipe Pengukuran: Kuantitatif Sumber Data : BPS
Sasaran: Meningkatkan produktivitas perusahaan dan aset	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	Formulasi Pengukuran : $IPG = \text{Rata-rata dengan data}$ menghubungkan angka- harapan hidup, angka rata-rata hari, rata-rata lama sekolah dan rata-rata pendapatan antara laki-laki dan perempuan $IPM \text{ perempuan} / IPM$ $\text{laki-laki} \times 100$ Tipe Pengukuran: Kuantitatif Sumber Data : BPS
	Indeks Pembangunan Anak	Indeks	Formulasi Pengukuran : jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan / jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan $\times 100\%$ Tipe Pengukuran: Non Kuantitatif Sumber Data : DBK008 PIA Kabupaten Klaten



	Pengujian Peningkatan Keberhasilan Terdapat Peningkatan dan Tidak	f_2	Formulasi Pengukuran : Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terdapat di / jumlah data korban kekerasan perempuan dan anak yang terdapat di 100% Tipe Pengukuran: Kuantitatif Sumber Data : DBSUS PIA Kategori Keluarga
Tujuan			
Meningkatkan pemahaman pengkaji	Keberhasilan Peningkatan Keberhasilan Tidak	f_2	Formulasi Pengukuran : Jumlah peserta yang ikut dalam pengkaji 40% jumlah / total peserta dalam pengkaji x 100% Tipe Pengukuran: Non Kuantitatif Sumber Data : BPS
Indikator			
Keberhasilan pengkaji misi	Tingkat Keberhasilan	f_2	Formulasi Pengukuran : Jumlah peserta yang ikut dalam pengkaji 40% jumlah / total peserta dalam pengkaji x 100% Tipe Pengukuran: Non Kuantitatif Sumber Data : BPS
	Peningkatan Keberhasilan Tidak	f_2	Formulasi Pengukuran : Jumlah peserta yang ikut dalam pengkaji 40% jumlah / total peserta dalam pengkaji x 100% Tipe Pengukuran: Non Kuantitatif Sumber Data : BPS



			subparten/area awal skanor : 2 Type Pengukuran: Non Kontak Sumber Data : D880673A
--	--	--	--



1. BIDANG TENAGA KERJA KUALIFIKASI KEBUMIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN

TUJUAN POLISI

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral serta Bidang Transmigrasi

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan tenaga kerja, pekerjaan transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial serta energi dan sumber daya rural yang menjadi kewenangan Daerah tugas pemerintahan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI

- penyusunan rencana dan program di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi,
- pengaturan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi,
- pelaksanaan koordinasi di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi,
- pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi,
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi,
- pelaksanaan administrasi Dinas,
- pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi koordinasi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAJUTAH	Indikator/Permalink Pengukuran Tipe Pengukuran Sumber Data
Tujuan			
Meningkatkan pertemuan perdagangan	Kelompok Pedagang Sektor Bank Dana	%	Formasi Pengukuran jumlah pedagang kelompok berpedagang 40% (10000) / total pedagang seluruh pedulian 100%
			Tipe Pengukuran: Mon



Daftar:			
Indikator yang diteliti	Angka Pengangguran	%	Formula Pengukuran : $\text{jumlah pengangguran} / \text{jumlah angkatan kerja} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS
	Persentase Ketenakerjaan Disamping Melak	%	Formula Pengukuran : $\text{jumlah pencari kerja terdistribusi yang disamping melak} / \text{jumlah pencari kerja terdistribusi} \times 100\%$ $= \text{jumlah pencari pekerjaan selain (n-1) yang terdistribusi di dalam kerja} / \text{jumlah pencari pekerjaan selain (n-1)} \times 100\%$ $= 2$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISHAKER
	Persentase Disamping yang Disampingkan	%	Formula Pengukuran : $\text{jumlah terdistribusi disamping} / \text{jumlah terdistribusi yang disampingkan} \times 100\%$ $= \text{jumlah terdistribusi disamping} / \text{jumlah terdistribusi yang disampingkan} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISHAKER



K. DIBAS PERTANYAAN DAN JAWABAN KABUPATEN SIBUHUT

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN TUGAS PUSUK

- 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Pangan
- 2. Melakukan Raperd dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemerintahan yang diberikan kepada daerah

PLANOGE

- a. penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi ketahanan lain yang diberikan oleh Bupati.



Variabel dan Sasarannya EKSISTENSI	Indikator SIMPAN	Satuan	Pembahasan Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data
Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan inklusif dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	Formulasi Pengukuran $POERS \text{ Atas Dasar Harga Konstan Tahun } (t) = \frac{POERS \text{ Atas Dasar Harga Konstan Tahun } (n-1)}{POERS \text{ Atas Dasar Harga Konstan Tahun } (n-1)} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS
Sasaran Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer	JOBS ADHA Sektor Primer	miliar rupiah	Formulasi Pengukuran dari POER ADHA sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan nilai pertaniannya dan perikanan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : BPS
	Persebaran Distribusi Nilai Produk Perikanan	%	Formulasi Pengukuran $\text{nilai produksi pertanian sektor (n) dalam rupiah} = \frac{\text{nilai produksi pertanian sektor 2020 dalam rupiah}}{\text{nilai produksi pertanian sektor 2020 dalam rupiah}} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : BPS/ADHA
Tujuan Meningkatkan pertumbuhan pembangunan	Strategi Pengembangan Pendapatan (ukuran Triak Ganda)	%	Formulasi Pengukuran jumlah pendapatan kelompok berpendapatan 40% terendah * total pendapatan seluruh penduduk * 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BPS



Literatur keterangkanya perantara media	Tingkat literasi	Ya Penilaian Pengukuran jumlah penduduk dengan pengiraan di bawah para kemiskinan / jumlah penduduk yang $BPOQ \times 100\%$ Tipe Pengukuran : <i>Non Kuantitatif</i> Sumber Data : <i>BPS</i>
	Aspek-aspek Struktur Intermediasi Geografi Pangan dan Perikanan	Ya Penilaian Pengukuran jumlah aspek Intermediasi energi dan aspek Intermediasi pangan dalam 30- jumlah aspek Intermediasi energi dan aspek Intermediasi pangan dalam 2000 / jumlah aspek Intermediasi energi dan aspek Intermediasi pangan dalam 2000 $\times$ 100% Tipe Pengukuran : <i>Kuantitatif</i> Sumber Data : <i>ESTAFANO</i>



L. DUKAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MINERANG KABUPATEN KIRMEN

URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS

FUNGSI

Urutan Prioritas Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Minerang

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi Usaha Kecil Minerang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- persiapan rencana dan program di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi usaha kecil dan minerang;
- penyusunan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan minerang;
- pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan minerang;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan minerang;
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan minerang;
- pelaksanaan administrasi Dinas;
- pengendalian penyelenggaraan tugas dan Pelaksanaan Tindakan pada Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi koordinasi lain yang diberikan oleh Bupati.

TEMA DAN SASARAN KETERANGAN	INDIKATOR KUALITAS	DATA	FORMULASI (Formula Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkeadilan dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	Formula Pengukuran / PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (t) - PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (t-1) / PDRB (t-1) Dasar Harga Konstan Tahun (t-1) x 100%



			Tipe Pengukuran : Non Kuantitatif Sumber Data : BPS, DESKORINDAG KORM
Sasaran : Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor usaha	PORB ADHK Sektor Usaha	nilai absolut	Formulasi Pengukuran: penjabaran PORB ADHK sektor perdagangan ritel dan grosir: sektor perdagangan air, perdagangan pangan, tekstil dan kulit, logam, elektronik, sektor perdagangan besar dan e-commerce, sepeda motor, sepeda listrik, transportasi darat, transportasi, minor perdagangan sipil, perdagangan kesehatan, informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perantara: sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan (MILIT), sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Tipe Pengukuran: Non Kuantitatif Sumber Data : BPS
	Persentase Penjabaran PORB ADHK Sektor Perdagangan	%	Formulasi Pengukuran : $\text{PORB ADHK sektor perdagangan besar dan e-commerce tahun } (t) : \text{PORB ADHK sektor perdagangan besar dan e-commerce tahun } (t-1) / \text{PORB ADHK sektor perdagangan besar dan e-commerce tahun } (t-1) \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Sumber Data : BPS, DESKORINDAG KORM
Sasaran : Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PORB ADHK Sektor Sekunder	%	Formulasi Pengukuran : dari PORB ADHK sektor industri pengolahan Tipe Pengukuran: Sumber Data : BPS



Penyakit Penyakit ADHS-Selanjut Penderita (100)	%	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Penderita ADHS selanjut}}{\text{jumlah penderita selanjut}} \times 100\%$ Tipe Pengukuran : Non Eksperimental Sumber Data : BPS
Penyakit (Tipe-1 Selanjut)	%	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah penderita selanjut}}{\text{jumlah penderita selanjut}} \times 100\%$ Tipe Pengukuran : Non Eksperimental Sumber Data : BPS
Penyakit / tipe Kek. Menengah yang Berakumulasi	%	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah penderita selanjut}}{\text{jumlah penderita selanjut}} \times 100\%$ Tipe Pengukuran : Non Eksperimental Sumber Data : BPS

M. DAAS PERUMAHAN MUDAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN TUGAS POKOK

FUNGSI

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- penggiatan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- perencanaan kegiatan di bidang di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pengabdian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan tugas kebidanan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERJELASAN Formula Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data
Tujuan			
Mengajukan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkeadilan dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	Formula Pengukuran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n) - PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1) / PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun (n-1) x 100% Tipe Pengukuran: Non Komutatif Sumber Data : BPS
Sasaran			
Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pendayagunaan Modal Tetap Bruto ADHK	Nomor rupiah	Formula Pengukuran dari PDRB pengalangan ADHK pada komponen Penanaman Modal Tetap Bruto Tipe Pengukuran: Non Komutatif



	Perolehan Peringkat Kerangka	Formula Pengukuran jumlah nilai investasi bernilai nasional ² dalam rupiah tahun t_1 - jumlah nilai investasi bernilai nasional ² dalam rupiah tahun 2020 / jumlah nilai investasi bernilai nasional ² dalam rupiah tahun 2020 x 100% Tipe Pengukuran: Sisi Kumulatif Sumber Data: SPMPTSP
--	------------------------------------	---



Norma

Mengapainya kegiatan ekonomi sektor sekunder

POB ADHE Sektor Sekunder

nilai rupiah

Formulasi Pengukuran dan POB ADHE sektor industri pengolahan

Tipe Pengukuran: Non Eksistensi/
Bantuan Dana : DPO

Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Terapan Maja dan Mandiri

ke

Formulasi Pengukuran : jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maja dan mandiri / jumlah desa total x 100%

Tipe Pengukuran: Non Eksistensi/
Bantuan Dana : Dana MBO



0. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN KEBUNIH

URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKUKAN
TUGAS POKOK

Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi,
Bidang Statistik dan Bidang Perencanaan
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang perencanaan dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pemerintahan yang lain yang berada di Daerah.

FUNGSI

- penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi
- perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi
- pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi
- pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi
- pengelolaan, evaluasi dan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi
- pelaksanaan administrasi Dinas
- pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi koordinasi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan 1			
Menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan yang benar dan baik	Indeks Informasi RUMAH	Indeks	Formulasi Pengukuran: Penilaian berdasarkan kuantitatif penilaian: A. Rangsangan Pengukuran (skor 50%) 1. Penilaian (skor 20%) 2. Hasil wawancara (skor 10%) 3. Dokumentasi (skor 10%)



			4. Komponen Hasil Kerja 40% 1. Administrasi Kerja dan Keuangan (17%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Peningkatan yang bersih dan bebas KKN (10%) 4. Kinerja Organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian PAN dan RB
--	--	--	--

Isiuran:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	Formula Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 aspek Survey Kepuasan Masyarakat yaitu : 1. Respons 2. Waktu, metode dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Tidak operasional jasa 6. Ketersediaan pelayanan 7. Kualitas pelayanan 8. Kerasa dan prosedur 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Melalui pengisian formulir Kepuasan Masyarakat
	Persentase OPD yang mengisi Website Data Desa Bersih SDP	%	Formula Pengukuran : jumlah OPD yang mengisi website Data Desa Bersih SDP / jumlah OPD x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Disdikbudh&D
Peningkatnya kinerja bersih dan akuntabel	Nilai DAIRP	Nilai	Formula Pengukuran: Mendapat komponen penilaian : 1. Aspek rencana Kinerja bobot 20% 2. Pengukuran Kinerja bobot 20% 3. Pelaporan Kinerja bobot 15% 4. Evaluasi Kinerja bobot 15%



			Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian PPN dan BPS
	Persentase Denda dan Ketuntasan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Denda dan Ketuntasan	94	Formulasi Pengukuran : jumlah denda dan ketuntasan yang telah menggunakan tanda tangan elektronik / jumlah denda dan ketuntasan x 100% Algoritma logistik yang terintegrasi oleh badan otoritas dan mandiri region Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : DISKOMINFO
Dereguadnya layanan yang meliputi	Indeks SPBE	ketika	Formulasi Pengukuran : Komponen penilaian : A. Domain Kebijakan SPBE 1. Kebijakan internal tiap lembaga SPBE 2. Kebijakan internal layanan SPBE B. Domain Tata Kelola SPBE 1. Rekomendasi 2. Strategi dan perencanaan 3. TIK C. Domain layanan SPBE 1. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik 2. Layanan publik berbasis elektronik Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PPN dan BPS



2. DINAS PARTISIPASI DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

- URUSAN PEMERINTAHAN
YURISDIKSI
TUJAS**
- Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan
 - Melaksana Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pemerintahan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI**
- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan pariwisata, pemertanian perikanan dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemertanian perikanan dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan pariwisata, pemertanian perikanan dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemertanian perikanan dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pariwisata, pemertanian perikanan dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi koordinasi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PELAKSANAAN (Peraturan Pengaturan, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkeadilan dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.	Pertumbuhan Ekonomi	%	Norma dan Pengukuran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun $t-1$ / PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun $t-1$ / PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun $t-1$ a 100%
			Tipe Pengukuran: Non Kompleks



Sampel

Identifikasi jenis perusahaan
investasi terhadap
partisipasinya dalam

FDOR ADIR
Jektor Turner

ini ini
rupiah

Formulasi Pengukuran
dari pengukuran FOD
ADIR, nilai pengukuran
kembali dan gaji sektor
pengadaan air,
pengadaan listrik,
kembali dan dari ulang,
sektor komersial sektor
pengadaan listrik dari
sektor, sektor (sektor),
dan sektor sektor, sektor
transportasi dan
pengadaan listrik
pengadaan listrik
dan sektor sektor,
sektor sektor dan
komersial, sektor jasa
keuangan dan sektor,
sektor nilai sektor, sektor
jasa perusahaan, sektor
administrasi
sektor sektor
pengadaan dan sektor
sektor sektor, sektor jasa
pengadaan, sektor jasa
keuangan dan logistik
sektor, dan sektor jasa
keuangan

Tipe Pengukuran
Kursus
Sumber Data : SPK

Kurikulum
Pengukuran
Pengukuran
Pengukuran

%

Formulasi Pengukuran
jumlah pengukuran FOD
dari sektor: pengadaan /
jumlah total FOD x 100%

Tipe Pengukuran: Non
Kursus
Sumber Data
DISKUSI

Tujuan

Mengidentifikasi kembali
nilai di dalam
masyarakat

Yuktes, Kerdasari
Tomas

ini ini

Formulasi Pengukuran
dikembangkan dengan nilai
yang didasarkan dengan
keajaiban. Hal ini
dikembangkan dengan
keajaiban keajaiban,
berdasarkan 5 dimensi
keajaiban nilai yang:
1. Keajaiban sosial
2. Nilai dan keajaiban
sektor sektor
3. Tindakan
4. Keajaiban
5. Keajaiban Umum

Tipe Pengukuran:
Kursus
Sumber Data : Bagian



Gambar Menunjukkan perubahan kebudayaan	Perubahan Budaya yang Ditunjukkan	%	Faktor lain yang berkontribusi yang ditunjukkan + perubahan budaya yang ditunjukkan -2 Tipe Pengukuran: Non Kuantitatif Sumber Data tergantung
--	---	---	---



9. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KERMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Kelautan, dan Bidang Kelautan dan Perikanan

Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Kelautan dan Perikanan dan bidang Kelautan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kesehatan, pemetaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolan perampasan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. pemetaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemetaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolan perampasan, kesehatan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemetaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolan perampasan, kesehatan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan arbitrase di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemetaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolan perampasan, kesehatan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemetaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolan perampasan, kesehatan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas dan Pelaksanaan Tugas pada Dinas dan
- h. pelaksanaan fungsi koordinasi lain yang diberikan oleh Bupati.



TEMA DAN SUBTEMA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	WILAYAH (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan			
Menjadi pemegang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan melalui peningkatan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	Formulasi Pengukuran : $0,7 \times \text{Indeks Kualitas Infrastruktur daerah} + 0,3 \times \text{Indeks Kualitas Lingkungan Hidup}$ dalam % Tipe Pengukuran : Non Komulatif Sumber Data : DCHSP
Sasaran			
Meningkatkan kondisi lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	Formulasi Pengukuran : $0,176 \times \text{Indeks Kualitas Air} + 0,400 \times \text{Indeks Kualitas Udara} + 0,219 \times \text{Indeks Kualitas Tanah}$ Tipe Pengukuran : Non Komulatif Sumber Data : DISPERKULHUB dan DLHOP
Tujuan			
Menjadi pemertumbuhan ekonomi daerah yang adil, berkeadilan dan setara dengan masyarakat lain di wilayah Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	Formulasi Pengukuran : $\text{PODB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010} - 100\%$ / $\text{PODB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010} \times 100\%$ Tipe Pengukuran : Non Komulatif Sumber Data : BPS
Sasaran			
Meningkatkan ekonomi skala primer	PODB ADHE Sektor Primer	Miliar rupiah	Formulasi Pengukuran : $\text{PODB ADHE sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor pertambangan dan pertambangan lainnya}$ Tipe Pengukuran : Non Komulatif Sumber Data : BPS
Sasaran			
Peningkatan Nilai Produk Usaha Scaled dan Pemasaran	Peningkatan Nilai Produk Usaha Scaled dan Pemasaran	%	Formulasi Pengukuran : $\text{Nilai produk kolektif dan perikanan tahun 2020 dalam rupiah} - \text{Nilai produk kolektif dan perikanan tahun 2010 dalam rupiah} / \text{Nilai produk kolektif dan perikanan tahun 2010 dalam rupiah} \times 100\%$ Tipe Pengukuran : Non Komulatif Sumber Data : DCHSP



K. URAIAN KARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEMUKAH

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUNAS PUSUK

FUNGSI

- 1. Urusan Pemerintahan Bidang Karsipan dan Bidang Perpustakaan
- 2. Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kemukah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Karsipan dan Bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- 3. a. penyusunan rencana dan program di bidang karsipan dan bidang perpustakaan;
- b. penentuan kebijakan di bidang karsipan dan bidang perpustakaan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang karsipan dan bidang perpustakaan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang karsipan dan bidang perpustakaan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang karsipan dan bidang perpustakaan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian perundang-undangan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi, kedudukan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SARANAH STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAKUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan: Meningkatkan pelayanan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.	Indikator Efisiensi Birokrasi	Indikator	Formulasi Pengukuran Pendapatan berdasarkan kemampuan produksi A. Ekspansi Pengangkutan (bobot 60%) 1. Perencanaan (bobot 20%) 2. Tindak lanjut serta penyelesaian (bobot 10%) 3. Realisasi (bobot 30%)



			8. Komponen Hasil Bobot 40% 1. Administrasi Berkas dan Surat-surat (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Penerimaan yang bertanggung jawab dan berakhlak (10%) Kinerja organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Kuantitatif Sumber: Data Kementerian PAH dan WB
Indikator: Terwujudnya kinerja: kualitas dan kuantitatif	Nilai GANP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Menentukan komponen pendataan 1. Perencanaan kinerja (bobot 30%) 2. Penguasaan kinerja (bobot 30%) 3. Pelaksanaan kinerja (bobot 10%) 4. Dokumentasi kinerja (bobot 10%) 5. Capaian kinerja (bobot 20%) Tipe Pengukuran : Non Kuantitatif Sumber: Data Kementerian PAH dan WB
	Perencanaan Pengantar Daerah yang mengelola akurasi data.	%	Formulasi Pengukuran: jumlah Pengantar Daerah yang mengelola Akurasi data data / jumlah Pengantar Daerah x 100 % Tipe Pengukuran: Kuantitatif Sumber: Data DISKOPUS
Tujuan: Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Perencanaan Masyarakat	Indeks	Formulasi Pengukuran: Menentukan komponen pendataan: 1. Dimensi produktivitas dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 2. Dimensi kesehatan dengan indikator angka Harapan Hidup 3. Dimensi Pengeluaran dengan indikator Pengeluaran Perkapita Tipe Pengukuran: Non



Indikator

Menyebutkan Akreditasi dan Mutu Pendidikan	Pola, cara kerja sekolah	Tahun	Formulasi Pengukuran jumlah tahun yang digunakan oleh pendatang dalam menjadi pendidikan formal. Cakupan yang dihitung dalam penghitungan SLI adalah pendatang berusia 25 tahun ke atas. Tipe Pengukuran: Non Kurvulasi Sumber Data: RRS
Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Formulasi Pengukuran lamanya sekolah dalam jumlah tahun yang diharapkan akan direalisasi oleh anak pada umur tertentu di masa datang. Cakupan yang dihitung dalam penghitungan Harapan Lama Sekolah adalah pendatang berusia 7 tahun ke atas. Tipe Pengukuran: Non Kurvulasi Sumber Data: BPS
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Formulasi Pengukuran (luas literatur + jumlah perpustakaan tingkat provinsi + persentase keterampilan masyarakat + persentase masyarakat + persentase tingkat pelayanan berkualitas + persentase persentase sosial standar nasional perpustakaan + jumlah penyediaan literatur + persentase masyarakat + tingkat kemandirian masyarakat + jumlah anggota masyarakat) / jumlah penduduk usia 5-65 tahun x 100% Tipe Pengukuran: Kurvulasi Sumber Data: DBARPUIS



8. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PERENCANAAN SIPIL KABUPATEN SUMBER

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAKAN TUJAS POSISI

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pemerintahan yang diberikan kepada Daerah.

PEMILIK

1. penyusunan rencana dan program di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. penentuan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. pelaksanaan koordinasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. pengendahan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. pelaksanaan administrasi Daerah.
7. pengendahan, penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Daerah dan
8. pelaksanaan fungsi kodifikasi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PEMILIK (Pemakai Prosedur, Tipe Regulasi, Sumber Dana)
Tujuan Menyediakan informasi kea belia pemerintahan yang berada dan baik	Indikator Efektivitas Efisiensi	Indeks	Formulasi Pengukuran : Perbaikan berdasarkan komponen penilaian: A. Komposisi Pengukuran (total 50%) 1. Pemukiman (total 20%) 2. Hasil akurasi data pendataan (total 10%) 3. Reformasi (total 10%)



T. BAHAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN DASAR

KABUPATEN KEDURU
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN
TUJAS

Fungsi Pemering Urutan Perencanaan Bidang
Perencanaan, Perakitan dan Pengembangan

MURASE

Menberikan Bupri dalam melaksanakan fungsi
perencanaan urusan pemerintah bidang
perencanaan dan bidang peradilan dan
pengembangan Daerah yang menjadi
keuntungan Daerah

- proyeksi rencana dan program di bidang
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
pengembangan Daerah, bidang pemerintahan
dan pembangunan manusia, bidang
perencanaan, sumber daya alam, dan
infrastruktur, bidang peradilan dan
pengembangan;
- perumusan kebijakan di bidang
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
pengembangan Daerah, bidang pemerintahan
dan pembangunan manusia, bidang
perencanaan, sumber daya alam, dan
infrastruktur, bidang peradilan dan
pengembangan;
- pelaksanaan koordinasi di bidang
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
pengembangan Daerah, bidang pemerintahan
dan pembangunan manusia, bidang
perencanaan, sumber daya alam, dan
infrastruktur, bidang peradilan dan
pengembangan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
pengembangan Daerah, bidang pemerintahan
dan pembangunan manusia, bidang
perencanaan, sumber daya alam, dan
infrastruktur, bidang peradilan dan
pengembangan;
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan di
bidang perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi pengembangan Daerah, bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia,
bidang perencanaan, sumber daya alam,
dan infrastruktur, bidang peradilan dan
pengembangan;
- pelaksanaan administrasi Daerah;
- pengendalian penyelenggaraan tugas Unit
Pelaksana Teknis pada Badan; dan
- pelaksanaan fungsi bimbingan lra yang
diterima oleh Bupati.



Yurisdiksi dan Saran SARAJUDIS	INSTRUMEN KINERJA	SATUAN	PELAKSANA (Formatasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Formatasi Pengukuran Penilaian berdasarkan kelompok penilaian A. Kelompok Pengangkah bobot (60%) 1. Perumahan (bobot 20%) 2. Hasil analisis perubahan (bobot 10%) 3. Reformasi (bobot 30%) B. Kelompok Hasil bobot 40% 1. Akuntabilitas kinerja dan anggaran (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) 3. Perorientasian yang bersih dan tan bebas KKN (10%) 4. Kinerja organisasi (10%) Tipe Pengukuran: Non Kuantitatif Sumber Data: Kementerian PAN dan RB
Sasaran : Terdapatnya indikator bersih dan akuntabel	Indeks KAP	Indeks	Formatasi Pengukuran 1. Penguasaan kinerja (bobot 30%) 2. Penguasaan (bobot 25%) 3. Jalannya kinerja (bobot 10%) 4. Kualitas kinerja (bobot 10%) 5. Capaian kinerja (bobot 20%) Tipe Pengukuran : Non Kuantitatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RB



	Indeks Kualitas Pemenuhan	$\%_1$	Perhitungan Pengukuran : persentase jumlah program pada RSPD yang terencana dalam 30MBD + persentase jumlah kegiatan dan cakupan pada RPD yang terencana dalam RSPD : 1 Tipe Pengukuran : Non Kuantitatif Sumber Data : BAPPEDA
	Perhitungan Pemantauan Hasil pemantauan dan pengembalian	$\%_2$	Perhitungan Pengukuran : persentase pemantauan hasil pemantauan + persentase pemantauan hasil pengembalian : 2 Tipe Pengukuran : Non Kuantitatif Sumber Data : BAPPEDA



11. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KIRURUTH

URUSAN
PEMERINTAHAN YANG
DILAKSANAKAN
TUGAS

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

FUNGSI

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang
menjadi kewenangan Daerah

- a. persiapan rencana dan program di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. penusunan kebijakan di bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- f. pelaksanaan administrasi Badan;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit
Pelaksana Teknis pada Badan; dan
- h. pelaksanaan fungsi koordinasi lain yang
ditentukan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI (Rumus/Pragmatik, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan : Mewujudkan sistemasi ran kerja pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Efektivitas Berkas	Indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan komponen penilaian: A. Komponen Pragmatik (Bobot 50%) 1. Penemuan (Bobot 30%) 2. Hasil kerja 10% penemuan (Bobot 30%) 3. Efektif (Bobot 30%) B. Komponen Hasil (Bobot 40%) 1. Efektivitas Kinerja dan Kecapaian (10%) 2. Realisasi pelaksanaan gubernur (10%) 3. Pemerintahan yang bersih dan dan baik 20% (10%)



			Tipe Pengukuran : Non Samudra Sumber Data : Kementerian PUPR dan BPS
Indikator : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Formula Pengukuran : Rata-rata skor dari 9 aspek dari Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Waktu kedatangan dan penitikan 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk sesuai dari pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masyarakat Tipe Pengukuran : Sumber Data : Survei Organisasi Bina Kebudayaan Kabupaten
	Persentase Pemerataan PNS di area Jember	%	Formula Pengukuran : jumlah ASN yang telah mendonekan jabatan yang sesuai / jumlah total ASN x 100 % Tipe Pengukuran : Non Samudra Sumber Data : BPS/SDM
	Persentase ASN yang meningkat pendatangannya	%	Formula Pengukuran : jumlah jabatan' yang mendapat diikut struktur kepegawaian / jumlah seluruh jabatan' yang terdapat x 100% Tipe Pengukuran : Non Samudra Sumber Data : BPS/SDM



V. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN TUGAS

FUNGSI

Badan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi panjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang rampai kewenangan Daerah

- penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- pengelolaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- pelaksanaan administrasi Badan;
- pengendalian penyelenggaraan tugas dan Pelaksanaan Dinas pada Badan; dan
- pelaksanaan fungsi ketentutan lain yang diberikan oleh Bupati.

INDIKATOR STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERUMUSAN (Rencana Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan Menjadi badan pelayanan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Perumusan Pengukuran : Formula berdasarkan komposisi prestasi a. Kumpulan Pengukuran bobot 50% 1. Persentase bobot 20% 2. Hasil semua aspek pelayanan (bobot 10%) 3. Reaksi (bobot 10%)



			8. Kontribusi Masi (Bobot 40%) 1. Akuntabilitas Kinerja Asosiasi (10%) 2. Kualitas pelayanan publik (10%) Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (10%) Kinerja organisasi (10%)
Semester II			
Terwujudnya indikator bersih dan akuntabel	Musi SAKIP	PMU	Formulasi Pengukuran : 1. Perencanaan kinerja (bobot 30%) 2. Pengukuran kinerja (bobot 30%) 3. Pelaporan kinerja (bobot 15%) 4. Evaluasi kinerja (bobot 15%) 5. Capaian kinerja (bobot 10%) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian PAN dan RPJ
	Opini BPTI atas Laporan Rencana Strategis Dinas	Opini	Formulasi Pengukuran : Pendapat disimpulkan oleh BPTI dengan menggunakan penilaian 1. Asesmen dengan Standar Akuntansi Internasional 2. Keterbacaan pengungkapan 3. Kepastian terhadap pemastian Perundang-undangan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BPTI
	Persentase PMU terhadap Pendaftaran Cukai	%	Formulasi Pengukuran : $\text{jumlah PMU} / \text{jumlah pendapatan daerah} \times 100\%$ Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BPTI



URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKUKAN
TUGAS

PROSES

Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- Memberi Bantu dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang sesuai kewenangan Daerah dan tugas pemerintahan yang diberikan kepada Daerah.

a. penyusunan rencana dan program di bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. penemuan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarumma dan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan bangsa, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarumma dan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan bangsa, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarumma dan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan bangsa, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- g. pelaksanaan administrasi Bakti; dan
- h. pelaksanaan fungsi koordinasi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Format Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tujuan Mengurangi masalah sosial di dalam masyarakat	Indeks Kesehatan Sosial	Indeks	Penilaian Pengukuran diukur dengan survei yang dilakukan Badan Koordinasi Kelog. Kecamatan Daerah Kabupaten Sekeloa, berakreditasi 4 minimal masalah sosial yaitu: 1. Kesehatan mental 2. Polusi dan lingkungan serta masalah 3. Pekerjaan 4. Konflik 5. Kependudukan Tipe Pengukuran: Kuantitatif Sumber Data : Survei Desa Sekeloa Kabupaten Sekeloa
Keluaran : Meningkatnya nilai-nilai toleran kebangsaan	Pencapaian penanaman benih-benih toleran dalam ideologi, politik, budaya dan sumber daya manusia	%	Penilaian Pengukuran (jumlah penani benih yang ditanam / jumlah penani benih yang ada x 100%) Tipe Pengukuran: Non Kuantitatif Sumber Data : BAKOSDAKOTEC



X. BAHAN PENYANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEDIRI

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN TACAS

1. Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. menetapkan pedoman dan pengujian terhadap usaha penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi pasca aksi dan belajar;
 - b. menetapkan standar/isi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan mengaktakan/kan para tim/benar;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan pengolahan data dan laporan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan investasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

- a. penentuan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	WAKTU	PEMILITASI (Formulasi Pengaturan, Tipe Pengaturan, Sumber Dana)
Tujuan Menyediakan kondisi/kondisi wilayah	Indeks Kordinasi Wilayah	Indeks	Formulasi Pengaturan Intervensi pengungsi peta + informasi data kondisi bencana 1 Tipe Pengaturan: M Kordinasi Sumber Dana : APBD

**Metode**

Terjadinya wilayah tanggung bencana	Persebaran Dera Tanggung Bencana	N	Formulasi Tingkatkan jumlah dera tanggung bencana / jumlah dera x 100% Tipe Pengukuran Met. Kuantitatif Sumber Data: RPED
--	-------------------------------------	---	---



Y. KECAMATAN SE-KABUPATEN KEDIRI

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS

Sebagai Urusan Pemerintahan Umum
Maksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Bupati.

FUNGSI

- penyusunan urusan pemerintahan umum;
- pengoordinasian kegiatan pemerintahan masyarakat;
- pengoordinasian upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum;
- pengoordinasian perencanaan dan pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- pengoordinasian penyelenggaraan prosedur dan sarana pelayanan umum;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- kegiatan dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- perencanaan dan evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan
- pelaksanaan tugas kehumasan bias yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PEMILIKIAH (Pembuat Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
Tugas :			
Mewujudkan reformasi tata lola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Administrasi	Indeks	Formulasi Pengukuran : Perbaikan berdasarkan kemampuan analisis: A. Ekspansi Pengujian (Indeks 50%) B. Pemertanian (Indeks 50%)



		1. Model proses kerja perusahaan (setor 10%) 2. Sistem (setor 10%) 3. Komposisi hasil (setor 40%) 4. Akurasi hasil kerja dan keuangan (10%) 5. Kualitas pelayanan publik (10%) 6. Perencanaan peng. bersih dan dan bersih 2001 (10%) 7. Kinerja organisasi (10%) Tipe Pengukuran : Non Standard Sumber Data : Kuantitatif RAN dan KB
Kategori: Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Judul: Eksistensi Masyarakat	Kategori: Formulasi Pengukuran : Misi Bertanggung Jawab Sumber Kuantitatif Masyarakat jika: 1. Prinsip-prinsip 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Akurasi 5. Proses spesifikasi jenis pelayanan 6. Komposisi pelayanan 7. Perilaku pelayanan 8. Efisiensi dan produktivitas 9. Peningkatan peng. bersih dan bersih Tipe Pengukuran : Non Standard Sumber Data : Sumber Organisasi Serta Kabupaten Sukorejo

RUPATI KEBUMAH

Id.

ARTI SCOTTANTO